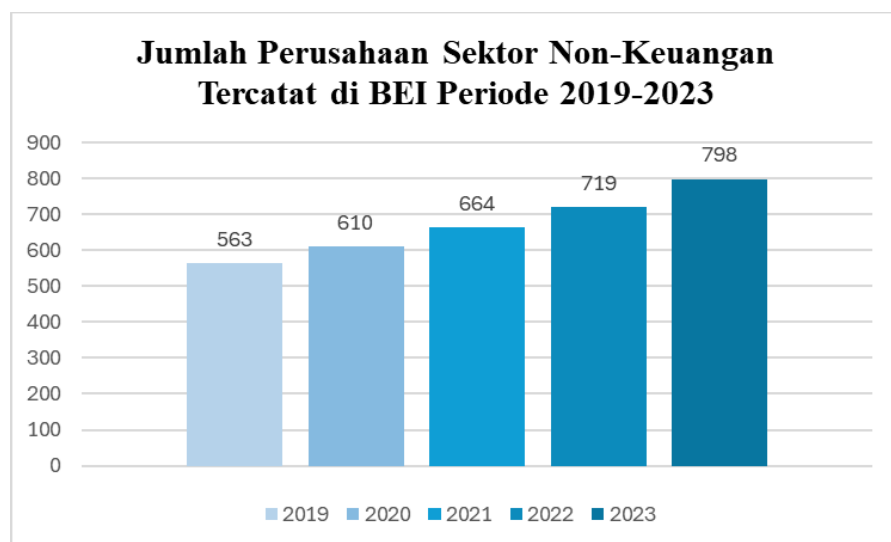


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2023. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI mencakup berbagai sektor industri yang memiliki karakteristik operasional dan dampak lingkungan yang berbeda-beda. Sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan klasifikasi IDX-IC (*Indonesian Stock Exchange Industrial Classification*) yaitu *Energy, Consumer Cyclical, Technology, Basic Material, Healthcare, Infrastructure, Industrials, Financials, Transportation and Logistic, Consumer Non Cyclical, Property and Real Estate*, dan *Listed Investment Product* (IDX-IC, 2021). Berdasarkan data BEI, terdapat lebih dari 500 perusahaan non-keuangan yang aktif diperdagangkan pada periode 2022-2023 (BEI, 2023). Peningkatan jumlah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



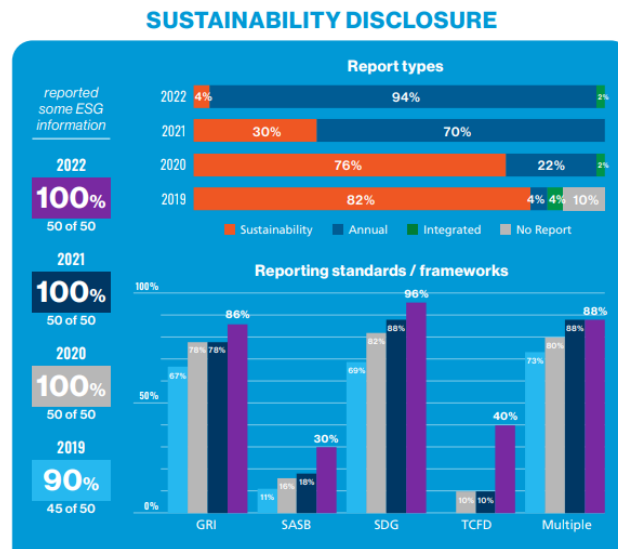
**Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor Non-Keuangan Tercatat di BEI
Periode 2019-2023**

Sumber: www.idx.go.id data diolah penulis (2024)

Penulis memilih untuk meneliti 11 sektor saja karena sektor keuangan memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, sehingga tidak cocok untuk

dibandingkan langsung dengan sektor non-keuangan dalam analisis kinerja keuangan (Wibowo, 2019). KPMG (2023) memaparkan perubahan iklim dapat memiliki dampak finansial yang sangat material bagi perusahaan non-keuangan, baik melalui risiko fisik (seperti bencana alam, perubahan cuaca) maupun risiko transisi (seperti perubahan regulasi, preferensi konsumen, teknologi). World Bank (2021) dalam laporan yang berjudul “*Climate Risk Country Profile: Indonesia*” menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat paparan risiko iklim yang sangat tinggi. Sekitar 80% bencana alam di Indonesia dipicu oleh perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Laporan tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara paling rentan terhadap risiko iklim secara global, terutama karena letak geografisnya yang rawan bencana dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam.

Perbedaan karakteristik antar sektor industri membuat tingkat keterpaparan terhadap risiko perubahan iklim bervariasi. Sektor seperti pertambangan, energi fosil, dan perkebunan memiliki potensi dampak yang lebih besar karena kegiatan operasionalnya sangat bergantung pada sumber daya alam dan rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan (UNEP Finance Initiative, 2024). Di sisi lain, sektor seperti teknologi informasi dan telekomunikasi mungkin memiliki risiko iklim yang lebih rendah secara langsung, namun tetap mendapat sorotan dari pihak lain seperti investor dan konsumen agar menerapkan praktik keberlanjutan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab (World Broadband Association, 2023). Sehingga, perusahaan non-keuangan menunjukkan variasi yang lebih besar dalam tingkat pengungkapan iklim (*climate disclosure*) dibandingkan sektor keuangan, yang cenderung lebih seragam karena adanya regulasi pelaporan yang lebih ketat (EY, 2020; Financial Stability Board, 2021). Variasi ini memberikan peluang untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana perbedaan pengungkapan iklim dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.



Gambar 1. 2 Tingkat Penggunaan Standar Keberlanjutan di Indonesia
 Sumber: IFAC (2023)

Di Indonesia, penerbitan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan semakin mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan di Indonesia menunjukkan tren positif terutama pengungkapan informasi iklim sesuai dengan rekomendasi TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*). Data pada Gambar 1.2 menunjukkan peningkatan yang signifikan adopsi kerangka pelaporan TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*) dari tahun 2019-2022 dibandingkan dengan kerangka kerja lainnya. Laporan PWC (2023), yang menyatakan adopsi TCFD di Indonesia meningkat dari 4% pada 2021 menjadi 10% pada 2022. Pada tahun 2022 standar pelaporan TCFD meningkat sebanyak 30% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia semakin sadar dan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi terkait risiko dan peluang yang muncul akibat perubahan iklim. Selain itu, melalui peluncuran *International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards S1 dan S2* baru-baru ini yang mengadopsi struktur Kerangka Kerja TCFD, pengungkapan yang terkait dengan iklim diduga akan menjadi lebih populer dan akan semakin diadopsi oleh perusahaan (PWC, 2023).

Penulis memilih periode 2022-2023 sebagai rentang waktu penelitian karena selama periode karena menandai implementasi awal regulasi pelaporan

keberlanjutan yang lebih komprehensif di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, perusahaan publik diwajibkan menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari laporan tahunan. Meskipun regulasi ini berlaku sejak 2017, penerapan secara luas baru mulai terlihat pada tahun 2021 dan meningkat signifikan pada 2022, di mana 88% perusahaan tercatat di BEI telah menyampaikan laporan keberlanjutan tahun 2022. Selain itu selama periode tersebut, terdapat peningkatan adopsi kerangka kerja *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama perusahaan meliputi memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, memastikan kepuasan pemangku kepentingan, serta menjaga praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab (Fatihudin et al., 2018). Setiap perusahaan akan terus berupaya meningkatkan tingkat profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat keuntungan, semakin besar pula rasa aman yang dirasakan oleh perusahaan (Asalam & Pratomo, 2020). Kartadjumena & Rodgers (2019) serta Shabbir & Wisdom (2020) menyatakan bahwa kinerja keuangan yang baik menjadi dasar bagi keberlangsungan perusahaan, karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang menarik bagi investor. Kinerja keuangan merupakan indikator utama untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba (Cahyaningsih & Rahadiansyah, 2023). Bagi perusahaan publik, kinerja keuangan tidak hanya menjadi acuan bagi internal manajemen, tetapi juga menjadi informasi penting bagi investor, kreditor, dan regulator.

Indikator seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Sales* (ROS) digunakan secara luas untuk menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan pendapatan penjualan guna mencapai profitabilitas (Fariyanti et al., 2018; Matveeva & Filatov, 2022). *Return on Assets* (ROA) mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan laba. Efisiensi ini dapat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang yang timbul akibat perubahan iklim, seperti adaptasi terhadap regulasi

lingkungan, pengelolaan sumber daya, dan strategi keberlanjutan jangka panjang (Kayakus et al., 2023). *Return on Assets* (ROA) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menilai kinerja finansial perusahaan di berbagai sektor industri sehingga memungkinkan perbandingan antar perusahaan dalam hal efektivitas penggunaan aset (Agbo & Egbunike, 2024). TCFD dalam laporannya menyebutkan perubahan kebijakan, teknologi, dan dinamika pasar yang dipicu oleh perubahan iklim dapat memengaruhi penilaian atas aset dan liabilitas organisasi. Aset yang memiliki masa manfaat panjang serta cadangan sumber daya, sangat rentan terhadap risiko iklim. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan gambaran mengenai dampak potensial perubahan iklim terhadap aset dan liabilitas mereka khususnya aset jangka panjang. Hal ini mencakup aktivitas dan keputusan yang telah maupun akan diambil, seperti investasi baru, restrukturisasi, penghapusan nilai buku (*write-down*), atau penurunan nilai (*impairment*) (TCFD, 2017).

Sementara itu, *Return on Sales* (ROS) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualan. ROS sangat dipengaruhi oleh efisiensi operasional dan strategi inovasi produk, termasuk pengembangan produk ramah lingkungan yang menjadi bagian dari respons perusahaan terhadap tuntutan keberlanjutan dan tekanan *stakeholder* (Ganda & Milondzo, 2018). Ketika perusahaan menetapkan target kinerja keuangan yang tinggi, mereka terdorong untuk mengembangkan berbagai strategi demi meningkatkan keuntungan, sambil tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar (Majidah & Aryanty, 2022). Risiko transisi dan risiko fisik akibat perubahan iklim dapat memengaruhi tingkat permintaan terhadap produk dan layanan suatu organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan dampak potensial terhadap pendapatan, sekaligus mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan atau menciptakan sumber pendapatan baru. Secara khusus, dengan semakin berkembangnya mekanisme penetapan harga karbon sebagai instrumen pengendalian emisi, industri yang terdampak perlu menelaah bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi kinerja pendapatan mereka (TCFD, 2017).

Salah satu contoh perusahaan yang terdampak risiko iklim yaitu PT Merdeka Copper Gold Tbk, perusahaan tambang mineral di Indonesia mengidentifikasi

sejumlah dampak finansial akibat risiko iklim terhadap kinerja perusahaan. Perubahan regulasi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan penerapan pajak karbon dan risiko peralihan yang berkenaan dengan transisi menuju teknologi rendah karbon dapat memberikan dampak buruk yang nyata terhadap bisnis. Perusahaan mengidentifikasi bahwa meskipun pajak karbon belum diterapkan saat ini, pemerintah Indonesia merencanakan penerapan pajak karbon sebesar Rp30.000/tCO₂e (sekitar USD2,10) pada tahun 2025 yang akan menyebabkan tambahan biaya operasional (OPEX) dan mengurangi margin laba operasional. Selain itu, risiko fisik seperti curah hujan ekstrem dan banjir berpotensi menghambat operasional tambang, mengurangi volume produksi, dan mengganggu rantai pasok. Kondisi tersebut dapat memicu meningkatnya biaya perbaikan peralatan pertambangan, kenaikan biaya bahan bakar untuk truk air, serta pembelian alat pelindung diri (APD) tambahan guna menjaga keselamatan kerja (PT Merdeka Copper Gold Tbk, 2023). Sementara itu, perusahaan energi seperti Medco Energy menghadapi risiko transisi yang substansial melalui implementasi mekanisme penetapan harga karbon. Perusahaan mengantisipasi dampak dari UU 7/2021 dengan pajak karbon USD 2,06/tCO₂e yang akan diperluas ke sektor lain pada tahun 2025, serta Peraturan OJK 14/2023 tentang perdagangan karbon melalui Bursa Karbon IDX. Menggunakan pendekatan konservatif skenario terburuk, Medco Energy memperkirakan potensi dampak finansial mencapai hingga USD 11,7 juta berdasarkan emisi GRK tahun 2023. Dampak ini mencakup seluruh aset minyak & gas serta ketenagalistrikan Medco Energy, baik domestik maupun internasional, menunjukkan bahwa risiko transisi menjadi ancaman finansial utama bagi kinerja keuangan perusahaan (PT Medco Energi Internasional Tbk, 2023).

Berdasarkan analisis *Swiss Re Institute* (2021), jika suhu global terus meningkat melebihi 2°C hingga tahun 2050, maka kerugian ekonomi dunia diperkirakan mencapai 0,2% hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, dengan negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi yang paling terdampak. Risiko iklim dapat mempengaruhi keuangan perusahaan berbagai jenis aset, penjualan, dan biaya sehingga penting untuk memasukkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam proses bisnis

(Iriyadi & Antonio, 2021). Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan risiko dan peluang terkait iklim, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak perubahan iklim juga semakin meningkat (Chen et al., 2023). Perusahaan dan investor yang proaktif mengelola risiko iklim mendapat manfaat dari pemahaman mendalam tentang tantangan masa depan. Hal ini membantu mereka lebih siap beradaptasi dan mengubah strategi bisnisnya sesuai kebutuhan (Megeid, 2024).

Praktik pelaporan informasi perusahaan terkait risiko, strategi, dan dampak perubahan iklim disebut *Climate Change Disclosure*. Praktik ini telah berkembang pesat di berbagai wilayah seperti Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, dan ekonomi berkembang (Iriyadi & Antonio, 2021). *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), yang dibentuk oleh *Financial Stability Board* pada tahun 2015, telah menjadi kerangka kerja global yang paling berpengaruh dalam pengungkapan informasi terkait iklim. Kerangka ini dikembangkan atas permintaan *Financial Stability Board* (FSB) untuk mengatasi kurangnya informasi bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dampak keuangan perubahan iklim (TCFD, 2017). Rekomendasi TCFD, berfokus pada empat area utama: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Dilansir dari International Cooperative and Mutual Insurance Federation (2021) *Environmental, Social, and Governance* (ESG) perusahaan menggunakan kerangka kerja TCFD menjadi wajib di negara-negara G7, seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Di wilayah Asia Tenggara, Singapura telah membuat pelaporan TCFD menjadi wajib bagi emiten di industri keuangan, pertanian, dan energi untuk laporan pada tahun 2024 (ASEAN Briefing weekly, 2023). Pada 26 Juni 2023, ISSB merilis *International Financial Reporting Standards* (IFRS) *Sustainability Disclosure Standards* S1 dan S2 yang mengadopsi arsitektur Kerangka Kerja TCFD, dengan begitu pengungkapan yang terkait dengan iklim diduga akan menjadi lebih populer dan akan semakin diadopsi oleh perusahaan. IFRS S1 dan S2 akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan dan iklim mereka serta menghubungkan keberlanjutan/iklim dengan informasi keuangan (PWC, 2023).

Menurut laporan FSB tahun 2023, untuk tahun fiskal 2022 sebanyak 58% perusahaan telah mengungkapkan informasi minimal lima dari sebelas rekomendasi TCFD, meningkat signifikan dari 18% pada tahun 2020. Namun, hanya 4% perusahaan yang telah memenuhi seluruh rekomendasi TCFD, menunjukkan bahwa penerapan pengungkapan iklim masih dalam tahap awal dan belum merata secara global. Pengungkapan informasi iklim oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Sebagian perusahaan hanya sekadar memenuhi aturan dasar, tanpa benar-benar mengadopsi pendekatan pengungkapan yang lebih mendalam seperti yang dianjurkan oleh TCFD (Climate Scorecard, 2023; Climateworks Centre, 2023). Akibatnya, terdapat kesenjangan informasi yang bisa mempersulit investor dan pihak berkepentingan lainnya dalam menilai seberapa besar risiko iklim yang dihadapi perusahaan serta strategi keberlanjutan yang mereka terapkan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam siaran pers tanggal 27 Juni 2023 menyatakan Penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 oleh ISSB akan membantu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam pengungkapan perusahaan terkait keberlanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi beroperasi dalam kerangka kontrak sosial yang tidak tertulis, di mana keberlanjutan eksistensi perusahaan bergantung pada sejauh mana mereka dianggap sah oleh lingkungan sosialnya (Dowling & Pfeffer, 1975). Perusahaan sering kali mengungkapkan informasi tentang perubahan iklim hanya sebagai simbol untuk terlihat baik dan mendapatkan pengakuan, bukan untuk benar-benar mengurangi dampak lingkungan (Braasch & Velte, 2023; Herman et al., 2024). Pengungkapan keberlanjutan dibuat dengan dua tujuan utama. Pertama, perusahaan ingin menunjukkan kepatuhan mereka terhadap norma, regulasi, dan ekspektasi publik. Kedua, pengungkapan berfungsi sebagai alat mengungkapkan atau menyembunyikan sejauh mana perusahaan telah mencapai keberlanjutan (Touboul & Kozan, 2020). Pengungkapan ini membantu perusahaan menjaga citra dan menanggapi tekanan dari luar tanpa harus melakukan perubahan besar. Oleh karena itu, perusahaan yang secara aktif mengungkapkan strategi dan tindakan mereka dalam merespons risiko perubahan iklim berpotensi

memperoleh pengakuan sosial yang lebih kuat, serta memperkuat posisi mereka di mata *stakeholder*. Perusahaan yang mengungkapkan informasi terkait iklim sejalan dengan meningkatnya harapan masyarakat dan regulasi akan transparansi dan tanggung jawab lingkungan membantu mempertahankan atau meningkatkan legitimasi mereka (Fischer et al., 2023).

Pengabaian terhadap pengungkapan iklim dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi perusahaan maupun ekonomi secara luas. Dari sisi keuangan, perusahaan yang tidak menyampaikan informasi iklim secara memadai berisiko menghadapi kenaikan biaya modal, karena investor cenderung menilai perusahaan tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait risiko iklim (KPMG, 2023). Dari perspektif reputasi, transparansi terhadap isu lingkungan kini menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Dari sisi operasional, perusahaan yang tidak mengintegrasikan risiko iklim ke dalam strategi bisnisnya berisiko mengalami gangguan rantai pasok, peningkatan biaya operasional, dan kehilangan peluang bisnis dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Perubahan cuaca ekstrem, regulasi lingkungan yang dinamis, serta preferensi konsumen terhadap produk berkelanjutan menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi (World Climate Foundation, 2023). Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim dalam strategi bisnis dapat memberikan keuntungan ekonomi dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang menjadi pelopor dalam praktik ini (Eccles & Krzus, 2017). Hubungan antara pengungkapan iklim (*climate disclosure*) dan kinerja keuangan perusahaan semakin menjadi perhatian dalam literatur internasional. Namun, kajian yang secara khusus meneliti hal ini dalam konteks Indonesia masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada pelaporan keberlanjutan secara umum atau menggunakan sampel perusahaan multinasional dari negara maju, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dan tantangan lokal (Iriyadi & Antonio, 2021).

Kesadaran akan pentingnya transparansi terhadap isu perubahan iklim semakin mendorong lahirnya berbagai kebijakan pengungkapan di Indonesia. Salah satu tonggak regulatifnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.

51/POJK.03/2017, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan tahunan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Regulasi ini menjadi landasan awal bagi perusahaan untuk mulai mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam pelaporan keuangan mereka. Melalui peluncuran standar pelaporan keberlanjutan IFRS S1 dan S2 yang baru-baru ini mengadopsi kerangka kerja TCFD, pengungkapan terkait iklim diperkirakan akan menjadi lebih umum dan lebih banyak diadopsi oleh perusahaan. Pada tahun pertama penerapan IFRS S1 dan S2, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS memberikan kelonggaran bagi pengadopsi awal, memungkinkan mereka untuk terlebih dahulu menerapkan IFRS S2 yang berfokus pada pengungkapan terkait iklim, diikuti dengan penerapan IFRS S1 yang mencakup persyaratan umum untuk pengungkapan keberlanjutan dalam informasi keuangan pada tahun kedua pelaporan. Dalam konteks ini, IFRS S1 dan S2 akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan dan iklim mereka, serta mengaitkan keberlanjutan/iklim dengan informasi keuangan (PWC, 2023).

Meskipun terdapat kemajuan dalam adopsi praktik pengungkapan perubahan iklim, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang efektif, terutama di sektor non-keuangan. Perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan dalam melaporkan perubahan iklim. Selain itu, mengikuti panduan pengungkapan perubahan iklim yang terus berkembang dan kurangnya standar pelaporan yang konsisten juga menjadi tantangan bagi perusahaan (Koch, 2009). Indonesia memiliki karakteristik ekonomi dan regulasi yang unik, seperti ketergantungan tinggi terhadap sektor berbasis sumber daya alam, tingkat kesadaran ESG yang masih berkembang, serta regulasi pelaporan keberlanjutan yang relatif baru dan sedang dalam tahap penyesuaian dengan standar global (PWC, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pengungkapan iklim, terutama yang mengacu pada kerangka kerja *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan non-keuangan di Indonesia.

Di India, penelitian oleh Maji & Kalita (2022) menunjukkan bahwa pengungkapan keuangan terkait perubahan iklim berhubungan positif dengan kinerja perusahaan, yang berarti perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang perubahan iklim. Penelitian oleh Ghose et al. (2024) di Taiwan menyoroti bahwa pengungkapan perubahan iklim perusahaan (CCD) berdampak positif signifikan pada kinerja pasar pada 77 perusahaan India menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi tentang perubahan iklim cenderung berkinerja lebih baik secara finansial. Studi pada sektor asuransi oleh Stechemesser et al. (2015) juga mengonfirmasi bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim dan fleksibilitas operasional berkontribusi positif terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa strategi adaptasi iklim tertentu dapat meningkatkan ROA perusahaan. Selain itu, penelitian oleh Wedari et al. (2023) pada perusahaan di Australia menemukan bahwa inovasi lingkungan dapat memperkuat hubungan antara kinerja lingkungan dan *Return on Assets* (ROA). Artinya, pengungkapan perubahan iklim bisa lebih berdampak positif pada ROA jika disertai dengan inovasi, meski efeknya mungkin baru terlihat setelah beberapa waktu.

Namun, terdapat juga penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Kumar & Firoz (2018) dalam studinya terhadap perusahaan India tidak menemukan dampak signifikan dari skor *Carbon Disclosure Project* (CDP) terhadap ROA, meskipun terdapat pengaruh positif terhadap ROE. Penelitian lain yang menganalisis data global oleh Lorenzo et al. (2009) menemukan bahwa ada hubungan terbalik antara ROE dan pengungkapan perubahan iklim, tetapi tidak ada bukti yang jelas mengenai ROA. Ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa metrik keuangan mungkin dipengaruhi oleh pengungkapan iklim, ROA mungkin tidak selalu terpengaruh secara konsisten di berbagai konteks dan industri (Lorenzo et al., 2009). Ketidakkonsistenan dalam ROA untuk perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia ketika mempertimbangkan rekomendasi TCFD untuk pengungkapan perubahan iklim dapat disebabkan oleh tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan TCFD. Temuan dari studi pada perusahaan di Malaysia oleh Siew (2022) mengungkapkan bahwa terdapat variasi dalam metrik karbon yang

diungkapkan oleh perusahaan, sehingga membuat perbandingan menjadi sulit, yang dapat berkontribusi pada ketidakkonsistenan dalam perhitungan ROA. Di Indonesia penelitian Iriyadi & Antonio (2021) menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan ROA membentuk kurva U, ini berarti bahwa awalnya, hubungan antara keduanya bisa negatif, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut dapat berubah menjadi positif. Perusahaan yang meningkatkan kinerja lingkungan mereka pada akhirnya bisa melihat peningkatan dalam ROA mereka.

Terkait ROS, penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi. Studi pada perusahaan pertambangan Indonesia oleh Rahim et al. (2024) mengindikasikan bahwa aspek ekonomi dari laporan keberlanjutan mempengaruhi ROS secara signifikan, sementara aspek lingkungan tidak. Iriyadi & Antonio (2021) menyatakan bahwa *Climate Change Disclosure* tidak mempengaruhi ROS, mungkin karena perusahaan memilih inisiatif pengurangan karbon yang mudah dan murah atau bahkan tanpa biaya. ROS bisa mencerminkan apresiasi pasar terhadap upaya pengelolaan iklim; oleh karena itu, temuan negatif menunjukkan bahwa pelanggan di Indonesia mungkin tidak menghargai praktik perusahaan terkait iklim saat ini (seperti pelaporan keberlanjutan), yang pada akhirnya mengurangi penjualan dan keuntungan. Hal ini didukung oleh temuan Rokhmawati et al. (2017) yang menunjukkan bahwa preferensi pembelian pelanggan Indonesia lebih dipengaruhi oleh harga produk daripada aspek ramah lingkungan. Namun, penelitian oleh Sanjaya & Yoelencia (2024) menemukan pengaruh positif pengungkapan indeks karbon terhadap kinerja operasional termasuk ROS. Terdapat kesenjangan literatur yang berfokus pada perubahan iklim terhadap kinerja keuangan, terutama terkait rekomendasi TCFD di Indonesia sehingga hal ini menarik perhatian penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki pengaruh pengungkapan perubahan iklim, khususnya yang mengacu pada rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), terhadap kinerja keuangan (*Return on Assets* dan *Return On Sales*) perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022-2023.

Selain pengungkapan iklim, kinerja keuangan perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal lainnya seperti ukuran perusahaan (*size*). Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat sumber daya yang dimiliki perusahaan, kapasitas operasional, dan kemampuan dalam menyerap risiko eksternal. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan perusahaan perusahaan akan menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi (Fayola & Nurbaiti, 2020). Perusahaan berukuran besar umumnya lebih mudah mengakses modal baik dari lembaga perbankan maupun pasar modal sehingga memiliki keunggulan dalam mengembangkan ekspansi usaha. Kekuatan finansial yang lebih tinggi juga membuat perusahaan besar lebih diminati oleh kreditor, investor, dan pihak pemerintah (Panjaitan & Muslih, 2019). Ukuran perusahaan memiliki potensi memengaruhi baik pengungkapan perubahan iklim (*climate change disclosure*) maupun kinerja keuangan karena perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengelola isu lingkungan, menyusun laporan keberlanjutan yang lebih lengkap, dan mengimplementasikan strategi pengurangan emisi secara lebih efektif (Iriyadi & Antonio, 2021). Penelitian ini menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan ke dalam model regresi sebagai penyeimbang. Variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Syarifuddin & Saudi, 2022). Beberapa penelitian sebelumnya juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam studi yang meneliti hubungan antara pengungkapan keberlanjutan atau lingkungan dengan kinerja keuangan seperti Megeid (2024) dan Iriyadi & Antonio (2021).

Penulis memilih periode 2022-2023 sebagai rentang waktu penelitian karena selama periode karena menandai implementasi awal regulasi pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, perusahaan publik diwajibkan menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari laporan tahunan. Meskipun regulasi ini berlaku sejak 2017, penerapan secara luas baru mulai terlihat pada tahun 2021 dan meningkat signifikan pada 2022, di mana 88% perusahaan tercatat di BEI telah

menyampaikan laporan keberlanjutan tahun 2022. Selain itu selama periode tersebut, terdapat peningkatan adopsi kerangka kerja *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD). Melalui peluncuran standar pelaporan keberlanjutan IFRS S1 dan S2 yang baru-baru ini mengadopsi kerangka kerja TCFD, pengungkapan terkait iklim diperkirakan akan menjadi lebih umum dan lebih banyak diadopsi oleh perusahaan. Pada tahun pertama penerapan IFRS S1 dan S2, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS memberikan kelonggaran bagi pengadopsi awal, memungkinkan mereka untuk terlebih dahulu menerapkan IFRS S2 yang berfokus pada pengungkapan terkait iklim, diikuti dengan penerapan IFRS S1 yang mencakup persyaratan umum untuk pengungkapan keberlanjutan dalam informasi keuangan pada tahun kedua pelaporan. Dalam konteks ini, IFRS S1 dan S2 akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan dan iklim mereka, serta mengaitkan keberlanjutan/iklim dengan informasi keuangan (PWC, 2023). Tekanan global terhadap transparansi iklim semakin menguat, sementara perusahaan Indonesia masih dalam tahap adaptasi terhadap standar internasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi perusahaan, investor, dan pembuat kebijakan mengenai nilai strategis dari pengungkapan perubahan iklim yang komprehensif. Pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan ini dapat memberikan wawasan berharga bagi manajemen perusahaan dalam mengoptimalkan strategi pengungkapan mereka, serta bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mendukung upaya nasional dalam memitigasi risiko perubahan iklim serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.3 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, muncul pertanyaan penelitian terkait pengaruh *climate change disclosure* berdasarkan rekomendasi TCFD terhadap kinerja keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI. Meskipun perhatian terhadap pengungkapan iklim dan kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat dalam literatur internasional, kajian yang fokus pada konteks Indonesia masih tergolong terbatas. Sebagian besar studi menggunakan sampel dari negara maju atau sektor keuangan, sementara

karakteristik ekonomi Indonesia yang berbasis sumber daya alam serta penerapan regulasi keberlanjutan yang masih berkembang menunjukkan kebutuhan untuk memahami dinamika lokal secara lebih spesifik. Periode 2022–2023 merupakan masa penting karena tekanan global terhadap pelaporan ESG semakin meningkat, sedangkan perusahaan Indonesia masih dalam proses adaptasi terhadap kerangka kerja seperti TCFD. Tidak meratanya *climate disclosure* dan belum jelasnya pengaruhnya terhadap indikator finansial seperti ROA dan ROS mendorong perlunya kajian empiris yang mendalam. Maka dari itu, peneliti bermaksud menguji hubungan antara pengungkapan perubahan iklim (*Climate Change Disclosure*) dan kinerja keuangan pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Climate Change Disclosure* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Climate Change Disclosure* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap *Return on Sales* (ROS) pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2023?

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengungkapan informasi terkait perubahan iklim (*Climate Change Disclosure*) mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2023. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Climate Change Disclosure* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2023
2. Menganalisis pengaruh *Climate Change Disclosure* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap *Return on Sales* (ROS) pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2023

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pengaruh *Climate Change Disclosure* terhadap kinerja keuangan ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai bahan kajian akademik tentang pengaruh pengungkapan perubahan iklim (*Climate Change Disclosure*) terhadap kinerja keuangan perusahaan khususnya di sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini juga dapat membantu peneliti lain dalam mengembangkan metode dan pendekatan baru untuk mengkaji dampak perubahan iklim terhadap sektor ekonomi.

1.5.2 Aspek Praktis

Bagi Perusahaan

Informasi yang ada dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan dalam menentukan tujuan dan prinsip yang akan digunakan untuk mengembangkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik pengungkapan yang lebih baik, termasuk penerapan rekomendasi dari *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD), yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan reputasi dan kinerja keuangan mereka. Apabila mengetahui dampak dari pengungkapan yang baik, perusahaan dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan mereka.

Bagi Investor

Investor mendapatkan informasi yang lebih transparan mengenai pengungkapan perubahan iklim dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan.

Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengungkapan perubahan iklim oleh perusahaan. Kebijakan yang tepat dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk

mengungkapkan informasi terkait perubahan iklim, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian mengenai sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada dampak perubahan iklim terhadap sektor non-keuangan dan pentingnya pengungkapan perubahan iklim dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Bab ini juga mencakup perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan penelitian dan pengertian mengenai kinerja keuangan, perubahan iklim, dan pengungkapan perubahan iklim. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini, membahas kerangka pemikiran, serta hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis metode penelitian yang digunakan, termasuk teknik analisis data, variabel independen yang digunakan adalah *climate change disclosure*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai pengungkapan perubahan iklim secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan. Pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan tujuan penelitian disajikan dalam sub judul.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian setelah menganalisis pengaruh pengungkapan perubahan iklim terhadap kinerja keuangan. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan implikasi praktis bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim